

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi ditandai oleh perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat, yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat.¹ Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya.² Canggihnya teknologi modern dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, menurut Toffler,³ adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, yang telah ditandai dengan munculnya internet.

Internet (*interconnection network*) merupakan salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak dibidang dunia maya. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Syahrída, 2010, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Bandung : Nusa Media, hal. 1

² Hikmahanto Juwana, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta : Lentara Hati, hal. 23

³ Alvin Toffler, 1982, *The Third Wave*, Toronto : Bantam Books, hal. 155-204

internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-commerce*.⁴

Perkembangan transaksi *e-commerce*, tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon pembeli dari seluruh dunia. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).⁵

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).⁶ Hadirnya *e-commerce* memungkinkan terciptanya persaingan antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam merebut pangsa pasar.⁷

Melihat besarnya peluang bisnis yang ada, maka banyak orang berlomba-lomba mendirikan toko *online* (*onlineshop*) bahkan tak sedikit

⁴ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, hal. 1

⁵ Niniek Suparni, 2001, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Fortun Mandiri Karya, hal. 33

⁶ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung : Refika Aditama, hal. 144

⁷ Farizal F. Kamal, 1999, *Cyber Business*, cet. 3, Jakarta : Elex Media Komputindo, hal. 1

pula para pelaku usaha yang sudah mempunyai toko fisik, ikut mendirikan *onlineshop*.

Salah satu *onlineshop* yang memasarkan dan menjual produknya dengan media internet adalah Ranz Apparel yang menjual produk berupa baju gamis dengan sistem *ready stock* di mana sistem ini memberikan keuntungan bagi pihak pembeli karena tidak perlu menunggu waktu lama untuk memesan barang.

Dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha (*virtual store*) yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.⁸

Namun tidak sedikit pula konsumen yang merugikan pihak pelaku usaha, misalnya mengaku telah membayar lalu mengirimkan bukti transaksi palsu kepada pelaku usaha.

Oleh karena perkembangan teknologi yang sangat pesat khususnya di bidang media internet dan juga perlunya perhatian lebih pada para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online*, maka Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.

⁸ Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII, hal. 4

Dari uraian di atas, penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli secara *Online (Electronic Commerce)* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam hal penelitian ini, agar tidak terjadi kerancuan dalam penafsiran permasalahan dan pembahasan permasalahan, maka penulis mencoba untuk memberikan pembatasan pembahasan sebagai berikut:

- a. Dalam hal ini lebih menitikberatkan pada analisis keabsahan transaksi jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel yaitu pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel menurut UU ITE?

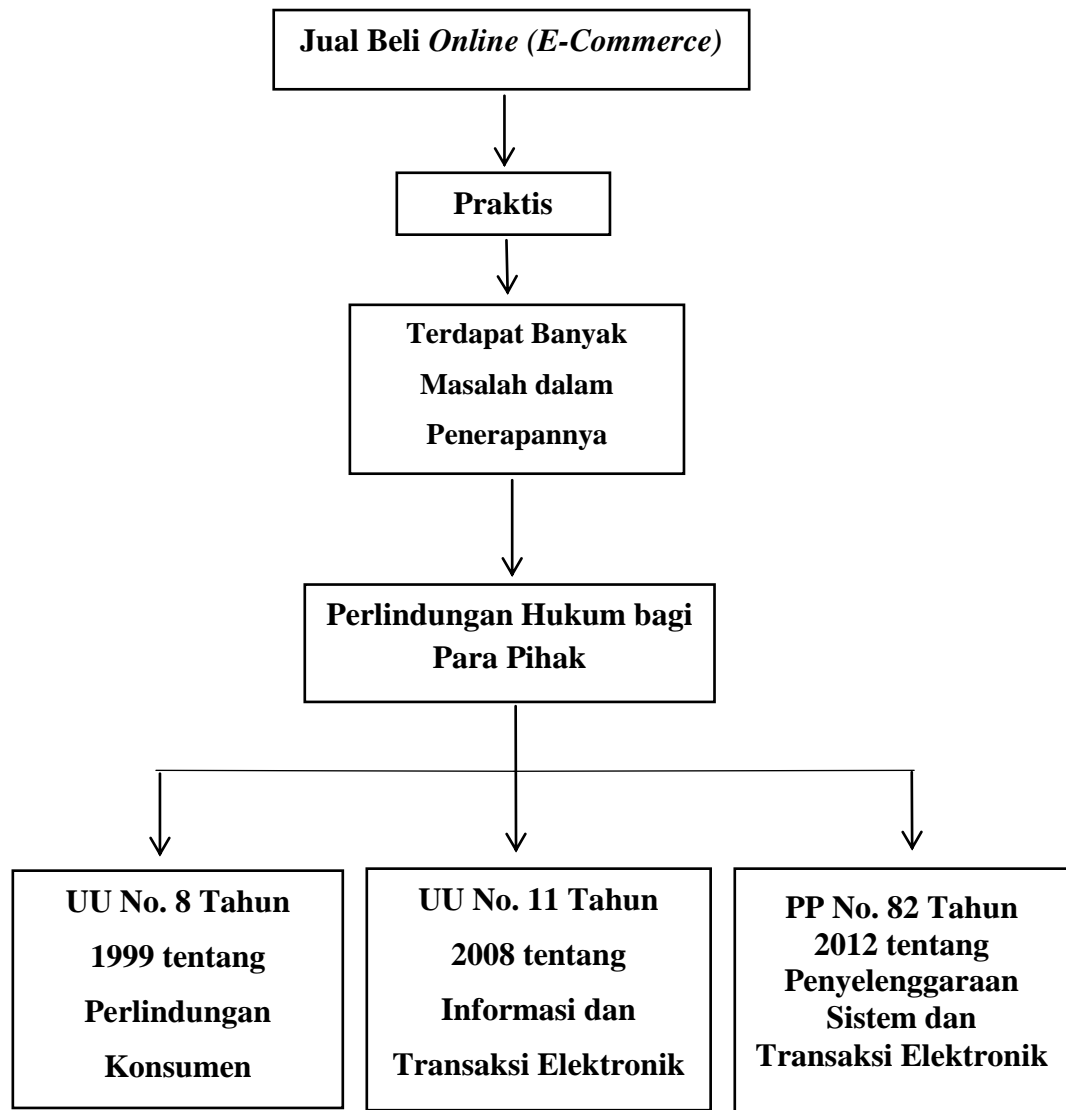
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan keabsahan transaksi jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel.
2. Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel menurut UU ITE.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli secara *online*.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti.
 - b. Mengembangkan pola pikir yang sistematis serta mengukur kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya jual beli secara *online*.

E. Kerangka Pemikiran



Menurut Pasal 1233 KUHPdata, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. R. Syahrani berpendapat bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang

terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.⁹

Adapun perikatan yang bersumber dari perjanjian jika salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan. Prestasi yang timbul dari perjanjian tidak hanya ditentukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian agar dipenuhi, tetapi juga prestasi yang ditentukan oleh undang-undang dan dilakukan secara timbal balik antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Perikatan yang bersumber pada undang-undang dibedakan atas dua macam, yaitu perikatan yang hanya bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan orang.¹⁰ Dalam hal ini, salah satu objek dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, misalnya jual beli atau sewa menyewa.

Pasal 1457 KUHPdata berbunyi :

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Terdapat dua jenis dalam pelaksanaan jual beli yaitu jual beli konvensional dan jual beli secara *online*. Dalam jual beli konvensional, pelaku usaha memasarkan produknya langsung di tempat tanpa menggunakan media internet dan cara bertransaksinya secara langsung

⁹ Riduan Syahrani, 2010, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, hal. 196

¹⁰ Ibid, hal. 253

antara penjual dan pembeli yang langsung bertemu di tempat. Sistem jual beli konvensional ini mulai kurang diminati masyarakat karena jika masyarakat ingin membeli sebuah barang harus pergi ke tempat penjual barang tersebut dan membutuhkan banyak tenaga serta menyita waktu. Jual beli konvensional diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara.

Adapun jual beli secara *online*, pelaku usaha memasarkan produknya melalui media internet dan cara bertransaksinya menggunakan sistem *transfer* di mana melibatkan pihak ketiga yaitu Bank atau pihak lainnya yang juga memiliki fungsi yang sama dalam hal transaksi secara *online*, pelaku usaha dan konsumen tidak perlu bertemu secara langsung di tempat. Sistem jual beli secara *online* ini mulai diminati oleh masyarakat, karena jika masyarakat ingin membeli suatu barang, tidak perlu pergi ke tempat penjual barang tersebut, melainkan hanya dengan membuka aplikasi internet, masyarakat bisa dengan mudah membeli barang yang diinginkan, menghemat waktu serta tenaga. Jual beli secara *online* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE khususnya Pasal 17 dan Pasal 18 di mana dalam pelaksanaannya tidak berbeda jauh dengan jual beli konvensional.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu bagian dari cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun

laporan.¹¹ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif yang artinya dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,¹² maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Sehingga dalam penulisan penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai perjanjian jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Surakarta tepatnya pada *online shop* Ranz Apparel untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini.

¹¹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 1

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 10

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap data primer maupun data

sekunder yaitu Kamus Hukum ataupun Kamus Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu dari beberapa literatur, buku, maupun dokumen-dokumen lainnya guna mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan metode untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian. Metode yang digunakan yaitu dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan antara pihak pelaku usaha yaitu penulis selaku pemilik *online shop* Ranz Apparel dan konsumen yang pernah berbelanja di *online shop* Ranz Apparel guna memperoleh data dan informasi secara langsung berkaitan dengan kebiasaan jual beli secara *online* pada *onlineshop* Ranz Apparel.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai

dengan angka secara langsung.¹³ Analisis kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian menguraikannya dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Skripsi

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II : Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sah Perjanjian
 - 3. Asas-Asas Perjanjian
 - 4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
 - 5. Overmacht dan Akibat Hukumnya
- B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli
 - 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli
 - 2. Subjek Hukum Perjanjian Jual Beli

¹³ Tatang M. Armin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 134

3. Objek Hukum Perjanjian Jual Beli

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli (*E-Commerce*)

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli *Online*
2. Jenis-Jenis Transaksi dalam Jual Beli *Online*
3. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli *Online*
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli *Online*
5. *Online Shop* Ranz Apparel

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Keabsahan transaksi jual beli secara *online* pada Ranz Apparel
- B. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online* pada *onlineshop* Ranz Apparel menurut UU ITE
 1. Hak dan Kewajiban bagi Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli pada *Online Shop* Ranz Apparel
 2. Kendala dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli secara *Online* pada *Online Shop* Ranz Apparel
 3. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Jual Beli pada *Online Shop* Ranz Apparel

BAB IV : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA